



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201

Nomor : 903/DJU/PS.00/8/2020 Jakarta, 28 Agustus 2020
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian SK KMA RI
Nomor 207/KMA/SK/VIII/2020
tentang Peningkatan Kelas Pengadilan

Yth. Ketua Pengadilan Negeri
(Daftar terlampir)

Menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK/VIII/2020 tentang Peningkatan Kelas Pada Dua Pengadilan Negeri Kelas II Menjadi Kelas I B dan Empat Pengadilan Negeri Kelas I B Menjadi Kelas I A, bersama ini diminta kepada Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana daftar terlampir untuk segera melaksanakan perubahan hal-hal administratif menyangkut :

1. Perubahan Klasifikasi / kelas pada Nomenklatur Pengadilan antara lain :
 - a. *Website* Pengadilan
 - b. Administrasi Surat Kedinasan
 - c. Papan Nama Pengadilan
2. Perubahan Administrasi Kepegawaian dan Keuangan antara lain :
 - a. Struktur Organisasi
 - b. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)
 - c. Penyesuaian Sistem Penggajian, Remunerasi dan Tunjangan Jabatan Lainnya
3. Dan hal-hal lain sebagai akibat dari penerapan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ini.

Demikian kami sampaikan agar menjadi perhatian dan segera dilaksanakan.

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**


PRIM HARYADI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura.

Lampiran
Surat Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor : 903/DJU/PS.00/8/2020
Tanggal : 28 Agustus 2020

**DAFTAR PENGADILAN NEGERI YANG DITINGKATKAN KELASNYA DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NO	PENGADILAN		KELAS	KETERANGAN
	TINGGI	NEGERI		
1	Bangka Belitung	Pangkal Pinang	I A	Peningkatan Kelas
2	Gorontalo	Gorontalo	I A	
3	Makassar	Mamuju	I A	
4	Maluku Utara	Ternate	I A	
5	Kalimantan Timur	Tanjung Selor	I B	
6	Jayapura	Manokwari	I B	



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 207/KMA/SK/VIII/2020

TENTANG

**PENINGKATAN KELAS PADA DUA PENGADILAN NEGERI KELAS II
MENJADI KELAS I B DAN EMPAT PENGADILAN NEGERI KELAS I B
MENJADI KELAS I A**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur peradilan dan reformasi birokrasi di bidang peradilan, maka dipandang perlu adanya peningkatan kelas pada dua Pengadilan Negeri kelas II menjadi kelas I B dan empat Pengadilan Negeri kelas I B menjadi kelas I A;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Peningkatan Kelas pada Dua Pengadilan Negeri Kelas II Menjadi Kelas I B dan Empat Pengadilan Negeri Kelas I B Menjadi Kelas I A;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung;
 5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 6. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 7. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7

Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/SK/VIII/2020 tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/638/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juni 2020 perihal Peningkatan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung RI yang Berlokasi di Ibukota Provinsi.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENINGKATAN KELAS PADA DUA PENGADILAN NEGERI KELAS II MENJADI KELAS I B DAN EMPAT PENGADILAN NEGERI KELAS I B MENJADI KELAS I A.
- KESATU** : Meningkatkan kelas Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan Pengadilan Negeri Manokwari dari Kelas II menjadi kelas I B.
- KEDUA** : Meningkatkan kelas Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengadilan Negeri Mamuju, Pengadilan Negeri Ternate dari Kelas I B menjadi Kelas I A.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Agustus 2020

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD SYARIFUDDIN

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
7. Panitera Mahkamah Agung RI;
8. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
9. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI;
10. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
11. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI;
12. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di lingkungan peradilan umum.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 207/KMA/SK/VIII/2020
TANGGAL : 19 Agustus 2020

DAFTAR PENGADILAN NEGERI YANG DITINGKATKAN KELASNYA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN
PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG

NO	PENGADILAN		KELAS	KETERANGAN
	TINGGI	NEGERI		
1	Bangka Belitung	Pangkal Pinang	I A	Peningkatan kelas
2	Gorontalo	Gorontalo	I A	
3	Makassar	Mamuju	I A	
4	Maluku Utara	Ternate	I A	
5	Kalimantan Timur	Tanjung Selor	I B	
6	Jayapura	Manokwari	I B	

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUIHAMMAD SYARIFUDDIN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 207/KMA/SK/VIII/2020
TANGGAL : 19 Agustus 2020

REKAPITULASI ESELONISASI
PADA PENINGKATAN KELAS PENGADILAN NEGERI DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG

NO	UNIT ORGANISASI	ESELON			
		III.a	III.b	IV.a	IV.b
1	Pengadilan Negeri Pangkal Pinang kelas I A	1	-	3	-
2	Pengadilan Negeri Gorontalo kelas I A	1	-	3	-
3	Pengadilan Negeri Mamuju kelas I A	1	-	3	-
4	Pengadilan Negeri Ternate kelas I A	1	-	3	-
5	Pengadilan Negeri Tanjung Selor kelas I B	-	1	3	-
6	Pengadilan Negeri Manokwari kelas I B	-	1	3	-
	JUMLAH	4	2	18	

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN